



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Juli 2018

Halaman: 2

DINAS PENDIDIKAN CARIL FORMULASI PAYUNG HUKUM

## Pengisian Kursi Kosong SMP Negeri

### Dikaji

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengkaji pengisian kursi kosong di beberapa SMP negeri. Pengisian kursi kosong SMP negeri itu untuk menjawab keluhan sebagian orangtua siswa warga kota yang anaknya tidak diterima di sekolah milik pemerintah karena aturan zonasi.

"Kami sedang mencari formula pengisiannya agar tidak menyalahi aturan. Kalau ada payung hukum pengisian kursi kosong SMP negeri itu kita fasilitasi," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Susanto, Rabu (18/7).

Seperti diketahui ada dua orangtua siswa yang tidak diterima di SMP negeri di Kota Yogyakarta mengadu dan meminta keadilan ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta. Mereka meng-

aku dari wilayah yang tidak terjangkau atau *blank spot* zonasi jarak ke 16 SMP negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan gagal pada jalur prestasi. Mereka meminta adanya kursi kosong di SMP negeri diprioritaskan untuk siswa di wilayah *blank spot*.

Namun saat ini PPDB jenjang SMP negeri telah berakhir dan siswa baru sudah diterima masuk sesuai hasil seleksi jalur prestasi dan zonasi jarak. Oleh sebab itu tidak ada dasar hukum untuk pengisian kembali kursi-kursi kosong di beberapa SMP negeri.

Edy mengakui masih ada sekitar 8-9 kursi kosong di beberapa SMP negeri di Kota Yogyakarta. Kursi kosong itu dari siswa yang diterima PPDB tapi tidak melakukan daftar ulang. Pihaknya akan berupaya mengkaji dasar hukum dan mekanisme pengisian kursi kosong SMP negeri dalam pekan ini.

"Kalau dari hasil kajian kami dasar hukumnya ada dan kalau masih memungkinkan maka pengisian kursi kosong paling lambat minggu depan," imbuhnya.

Menurutnya mekanisme pengisian kursi kosong di SMP negeri itu tidak berdasarkan nilai USBN karena PPDB berba-

sis zonasi. Oleh karena itu pengisiannya harus mengakomodir warga Kota Yogyakarta dan penduduk sekitar sekolah dulu. Pengisian kursi kosong juga hanya untuk siswa yang belum diterima di SMP negeri.

Pihaknya menegaskan sejak awal PPDB, Disdik Kota Yogyakarta sudah mengantisipasi bagi siswa yang berada di kecamatan yang tidak memiliki maupun jauh dari SMP negeri. Antisipasinya dengan membuka jalur prestasi dan kesempatan kedua mendaftar di jalur zonasi serta memilih sekolah pilihan hingga 16 SMP negeri.

Tapi masyarakat tidak memanfaatkannya secara optimal dengan memilih di semua 16 SMPN. Kalau 16 SMPN dipilih semua pasti akan masuk itu nilai USBN yang 24 dan 25 ke SMP negeri," terang Edy yang juga sudah menasionalisasikan memilih hingga 16 SMP negeri ke masyarakat.

Terkait sebaran jarak wilayah lulusan SD ke 16 SMP negeri, dia menyatakan jarak dari wilayah siswa ke SMP negeri itu akan muncul saat pengisian formulir pengajuan pendaftaran online. Jika siswa memilih di 16 SMP negeri maka jarak ke sekolah itu akan muncul semua.

Namun dia mengakui jarak hanya terlihat siswa yang bersangkutan dan tidak bisa melihat jarak sekolah dari siswa lainnya. Meski demikian ada statistik sebaran jarak yang diunggah di laman PPDB yang ditilainya bisa dimanfaatkan untuk melihat sebaran jarak terdekat dan terjauh di 16 SMP negeri. (Tri-m)

Instansi	Tindak Lanjut
1. ....	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. ....	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. ....	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. ....	
5. ....	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005